

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/ Subyek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan asing, jumlah rapat dewan komisaris, keberadaan komisaris wanita, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Tahun penelitian ini mencakup data pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Proses Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015	137	145	152	133	567
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan seluruh informasi dengan data yang diperlukan dalam pengukuran variabel yang digunakan pada laporan tahunan.	(111)	(119)	(126)	(107)	(463)
3.	Data <i>Outlier</i>	(4)	(4)	(4)	(4)	(16)
4.	Jumlah sampel yang diolah	22	22	22	22	88

B. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang menjelaskan hubungan pengaruh antara variabel struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* dengan variabel *mandatory disclosure*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPMAN	88	.00001	.25603	.0518983	.06815981
KEPLIK	88	.01985	.71862	.2530382	.16938998
KEPSING	88	.01249	.87315	.4525695	.24623667
RADKOM	88	1	24	5.10	3.081
PIKOID	88	.28571	.50000	.3812406	.07219383
JAKODIT	88	3	5	3.22	.513
MANDSCORE	88	.55000	.82000	.6996591	.07699006
Valid N (listwise)	88				

Keterangan : MANDSCORE (*Mandatory Disclosure*); KEPMAN (Kepemilikan Manajerial); KEPLIK (Kepemilikan Publik); KEPSING (Kepemilikan Asing); RADKOM (Jumlah Rapat Dewan Komisaris); PIKOID (Proporsi Komisaris Independen); JAKODIT (Jumlah Anggota Komite Audit)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 88 sampel. Variabel dependen yaitu MANDSCORE memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6996591; nilai

maksimum sebesar 0,82000; dan nilai minimum sebesar 0,55000 dengan standar deviasi 0,07699006.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu KEPMAN, KEPLIK, KEPSING, RADKOM, PIKOWA, PIKOIN, JAKODIT. KEPMAN memiliki nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,0518983; nilai maksimum sebesar 0,25603 dan nilai minimum sebesar 0,00001 dengan standar deviasi sebesar 0,06815981. KEPLIK memiliki nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,2530382; nilai maksimum sebesar 0,71862; dan nilai minimum sebesar 0,01985 dengan standar deviasi sebesar 0,16938998. KEPSING memiliki nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,4525695; nilai maksimum sebesar 0,87315; dan nilai minimum sebesar 0,01249 dengan standar deviasi sebesar 0,24623667.

RADKOM memiliki nilai rata rata (*mean*) sebesar 5,10; nilai maksimum sebesar 24; dan nilai minimum sebesar 1 dengan standar deviasi sebesar 3,081. Jumlah komisaris wanita dari 88 sampel perusahaan adalah 15, sedangkan sampel perusahaan yang tidak terdapat komisaris wanita berjumlah 73. PIKOIN memiliki nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,3812406; nilai maksimum sebesar 0,50000; dan nilai minimum sebesar 0,28571 dengan standar deviasi sebesar 0,7219383. JAKODIT memiliki nilai rata rata (*mean*) sebesar 3,22; nilai maksimum sebesar 5; dan nilai minimum sebesar 3 dengan standar deviasi sebesar 0,513.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas penelitian ini diuji menggunakan metode One-sample Kolmogorov-Smirnov (KS). Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Jika nilai *Asymp. Sig (2tailed)* > alpha (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Hasil pengujian normalitas yang dilakukan dengan uji K-S ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06963220
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.061
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 > alpha (0,05). Sehingga dapat di asumsikan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan metode *Variance Inflation Factor (VIF)*. Suatu model regresi yang terbebas dari masalah multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	.741	.079		9.370	.000		
KEPMAN	-.249	.172	-.221	-1.449	.151	.442	2.265
KEPLIK	.128	.058	.282	2.216	.029	.632	1.583
KEPSING	-.036	.050	-.115	-.722	.472	.402	2.485
RADKOM	.001	.003	.048	.458	.648	.920	1.087
PIKOWA	.050	.021	.245	2.360	.021	.949	1.054
PIKGIN	-.152	.124	-.143	-1.230	.222	.758	1.320
JAKODIT	.000	.017	-.002	-.018	.986	.823	1.214

a. Dependent Variable: MANDSCORE

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* setiap variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial (KEPMAN) memiliki nilai VIF sebesar 2,265; Kepemilikan Publik (KEPLIK) memiliki nilai VIF sebesar 1,583; Kepemilikan Asing (KEPSING) memiliki nilai VIF sebesar 2,485; Jumlah Rapat Dewan

Komisaris (RADKOM) memiliki nilai VIF sebesar 1,087; Keberadaan Komisaris Wanita (PIKOWA) memiliki nilai VIF sebesar 1,054; Proporsi Komisaris Independen (PIKOIN) memiliki nilai VIF sebesar 1,320; dan Jumlah Anggota Komite Audit (JAKODIT) memiliki nilai VIF sebesar 1,214. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari setiap variabel independen berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas dan model regresi layak untuk digunakan.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan metode *Durbin Watson* yang ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.427 ^a	.182	.110	.07261473	1.889
a. Predictors: (Constant), JAKODIT, KEPSING, PIKOWA, RADKOM, PIKOIN, KEPLIK, KEPMAN					
b. Dependent Variable: MANDSCORE					

Data yang tidak terjadi Autokorelasi harus memenuhi asumsi $dU < DW < 4 - dU$. Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,889 dengan nilai dU sebesar 1,8279 sesuai tabel

DW. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa $1,8553 < 1,889 < 4 - 1,8553$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregres variabel independen dengan *absolute residual*. Data dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* $> 0,05$. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	.026	.021		1.201	.233		
KEPMAN	-.005	.046	-.018	-.113	.910	.442	2.265
KEPLIK	-.004	.016	-.031	-.232	.817	.632	1.583
KEPSING	.022	.013	.277	1.660	.101	.402	2.485
RADKOM	.000	.001	.032	.287	.775	.920	1.087
PIKOWA	.000	.006	.009	.079	.937	.949	1.054
PIKOIN	-.056	.033	-.204	-1.676	.098	.758	1.320
JAKODIT	.005	.005	.120	1.026	.308	.823	1.214

a. Dependent Variable: ABS_RES

Keterangan : MANDSCORE (*Mandatory Disclosure*); KEPMAN (Kepemilikan Manajerial); KEPLIK (Kepemilikan Publik); KEPSING (Kepemilikan Asing); RADKOM (Jumlah Rapat Dewan Komisaris); PIKOWA (Keberadaan Komisaris Wanita); PIKOIN (Proporsi Komisaris Independen); JAKODIT (Jumlah Anggota Komite Audit)

Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa KEPMAN memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,910; KEPLIK memiliki nilai *Sig.*

sebesar 0,817; KEPSING memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,101; RADKOM memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,775; PIKOWA memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,937; PIKAIN memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,098; dan JAKODIT memiliki nilai *Sig.* sebesar 0,308. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi setiap variabel independen memiliki nilai signifikansi > alpha (0,05).

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.427 ^a	.182	.110	.07261473	1.889
a. Predictors: (Constant), JAKODIT, KEPSING, PIKOWA, RADKOM, PIKAIN, KEPLIK, KEPMAN					
b. Dependent Variable: MANDSCORE					

Tabel 4.7 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,110 atau 11%. Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil uji F dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.094	7	.013	2.543	.020 ^b
Residual	.422	80	.005		
Total	.516	87			
a. Dependent Variable: MANDSCORE					
b. Predictors: (Constant), JAKODIT, KEPSING, PIKOWA, RADKOM, PIKOIN, KEPLIK, KEPMAN					

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 2,543 dengan nilai signifikan sebesar $0,020 < \alpha (0,05)$. Sehingga variabel independen yang ada pada penelitian ini yaitu Kepemilikan Manajerial (KEPMAN), Kepemilikan Publik (KEPLIK), Kepemilikan Asing (KEPSING), Jumlah Rapat Dewan Komisaris (RADKOM), Keberadaan Komisaris Wanita (PIKOWA), Proporsi Komisaris Independen (PIKOIN), dan Jumlah Anggota Komite Audit (JAKODIT) memiliki pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS (MANDSCORE).

3. Uji *t*

Uji *t* dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi. Uji *t*

dilakukan dengan membandingkan antara nilai t yang dihasilkan dari perhitungan statistik dengan nilai t -tabel. Tabel 4.9 merupakan tabel dari hasil uji t .

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	.741	.079		9.370	.000		
KEPMAN	-.249	.172	-.221	-1.449	.151	.442	2.265
KEPLIK	.128	.058	.282	2.216	.029	.632	1.583
KEPSING	-.036	.050	-.115	-.722	.472	.402	2.485
RADKOM	.001	.003	.048	.458	.648	.920	1.087
PIKOWA	.050	.021	.245	2.360	.021	.949	1.054
PIKOIN	-.152	.124	-.143	-1.230	.222	.758	1.320
JAKODIT	.000	.017	-.002	-.018	.986	.823	1.214

a. Dependent Variable: MANDSCORE

Keterangan : MANDSCORE (*Mandatory Disclosure*); KEPMAN (Kepemilikan Manajerial); KEPLIK (Kepemilikan Publik); KEPSING (Kepemilikan Asing); RADKOM (Jumlah Rapat Dewan Komisaris); PIKOWA (Keberadaan Komisaris Wanita); PIKOIN (Proporsi Komisaris Independen); JAKODIT (Jumlah Anggota Komite Audit)

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.9 dapat diketahui persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{MANDSCORE} = 0,741 - 0,249(\text{KEPMAN}) + 0,128(\text{KEPLIK}) - 0,036(\text{KEPSING}) + 0,001(\text{RADKOM}) + 0,050(\text{PIKOWA}) - 0,152(\text{PIKOIN}) + 0,000(\text{JAKODIT}) + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda menggunakan uji t statistik, dapat diketahui hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9 nilai *sig.* untuk variabel kepemilikan manajerial (KEPMAN) sebesar $0,151 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,249$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (KEPMAN) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis pertama (H_1) **ditolak**.

b. Pengaruh Kepemilikan publik terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9, nilai *sig.* untuk variabel kepemilikan public (KEPLIK) sebesar $0,029 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,128$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel

kepemilikan publik (KEPLIK) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis kedua (H₂) **diterima**.

c. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9 nilai *sig.* untuk variabel kepemilikan asing (KEPSING) sebesar $0,472 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,036$. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing (KEPSING) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis ketiga (H₃) **ditolak**.

d. Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9 nilai *sig.* untuk variabel rapat dewan komisaris (RADKOM) sebesar $0,648 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,01$. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah

rapat dewan komisaris (RADKOM) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis keempat (H_4) **ditolak**.

e. Keberadaan Komisaris Wanita terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9, nilai *sig.* untuk variabel keberadaan komisaris wanita (PIKOWA) sebesar $0,021 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,050$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keberadaan komisaris wanita (PIKOWA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis kelima (H_5) **diterima**.

f. Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9 nilai *sig.* untuk variabel proporsi komisaris independen (PIKOIN) sebesar $0,222 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,152$. Hal tersebut menunjukkan bahwa

proporsi komisaris independen (PIKOIN) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis keenam (H₆) **ditolak**.

g. Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi dan nilai koefisien beta (β). Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai koefisien beta (β) searah dengan hipotesis yang diajukan maka hipotesis diterima. Berdasarkan Tabel 4.9 nilai *sig.* untuk variabel jumlah anggota komite audit (JAKODIT) sebesar $0,986 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,000$. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit (JAKODIT) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (MANDSCORE). Sehingga hipotesis ketujuh (H₇) **ditolak**.

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak
H ₂	Kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Diterima
H ₃	Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak
H ₄	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak
H ₅	Keberadaan komisaris wanita berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Diterima
H ₆	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak
H ₇	Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak

E. Pembahasan

1. Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama

(H₁) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS **ditolak**. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS diduga karena masih sedikit pihak manajemen yang memiliki saham di perusahaan manufaktur, sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hasil ini mendukung Alvionita dan Taqwa (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Gunawan dan Hendrawati (2016) juga menemukan hasil yang sama bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Utami dkk., (2012) dan Tondombala dan Lastanti (2016) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

2. Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H₂) yang

menyatakan kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS **diterima**.

Perusahaan manufaktur dengan kepemilikan publik akan cenderung menyediakan pengungkapan informasi yang memadai. Hal ini diduga karena emiten dituntut untuk melaporkan kondisi perusahaan untuk dilaporkan kepada publik atau masyarakat agar tidak muncul asimetri informasi guna mengurangi risiko investasi.. Hasil ini konsisten dengan Hardiningsih (2008) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary disclosure*.

3. Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan asing tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS **ditolak**. Besarnya kepemilikan asing bukan merupakan jaminan perusahaan untuk melakukan pengungkapan wajib secara luas. Hal tersebut diduga karena pihak asing yang memiliki saham di perusahaan Indonesia cenderung tidak menuntut pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan wajib.

Hasil ini konsisten dengan Yuliawati dan Sukirman, (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang menurut Putra (2013) merupakan pengungkapan *mandatory disclosure*. Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) (Putra, 2013). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 poin 3 yang berisi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat dan berkualitas secara meningkat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Alvionita dan Taqwa (2015) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi

IFRS **ditolak**. Hal tersebut diduga karena rapat dewan komisaris yang dilakukan hanya sebagai formalitas dan tidak membahas permasalahan yang detail sehingga rapat tidak efektif dalam membahas kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hasil ini konsisten dengan Supriyono dkk., (2014), Hafiz dkk., (2015), dan Pitasari dan Septiani (2014) yang menemukan bahwa rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Waryanto dkk., (2010) dan Sutiyok dan Rahmawati (2016) yang menemukan bukti bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

5. Keberadaan Komisaris Wanita terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, keberadaan komisaris wanita berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan keberadaan komisaris wanita berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS **diterima**. Hal ini diduga karena wanita lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan (Rahindayati, 2015). Selain itu wanita juga lebih hati-hati, cenderung menghindari risiko, dan lebih

teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan dengan pria. Sehingga dewan komisaris wanita mampu meningkatkan pengawasan dalam kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Paramita dan Marsono (2014) yang menemukan bukti bahwa proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Menurut Putra (2013) pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 poin 3 yang berisi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat dan berkualitas secara meningkat.

6. Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H_6) yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS **ditolak**. Hal ini diduga karena perusahaan

manufaktur rata-rata memiliki proporsi komisaris independen yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Sehingga pemegang saham lebih mempercayakan perusahaan kepada komisaris dari internal perusahaan karena dianggap lebih mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Utami dkk., (2012) dan Pitasari dan Septiani (2014) dimana proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Prawinandi dkk., (2012) dan Hafiz dkk., (2015) yang menemukan bukti bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

7. Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil pengujian, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh (H_7) yang menyatakan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS **ditolak**. Hal ini diduga karena anggota komite audit dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan. Jumlah anggota komite audit di perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kebanyakan berjumlah sedikit yaitu 3 orang saja. Sedangkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) tahun 2006, komite audit memiliki tugas yang penting dan cukup berat yaitu memastikan : (a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, (d) tidak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Jumlah komite audit yang kecil cenderung bergantung kepada auditor eksternal untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan. Sehingga keberadaan komite audit dipandang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Kharis dan Suhardjanto (2012) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Pitasari dan Septian (2014) dan Supriyono dkk., (2014) yang menemukan bukti bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.